



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **PERANGKAT DAERAH**

### **KECAMATAN NGEBEL**

#### **TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN NGEBEL**  
Jalan Telaga Nomer 2 Ngebel



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**KECAMATAN NGEBEL**  
Jalan Telaga Nomor 2 Telepon (0352) 591045  
**NGEBEL**

KEPUTUSAN CAMAT NGEBEL  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188.4/20 /405.30.19/2021

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGEBEL  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 perihal Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Kec Ngebel Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Camat Ngebel Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2022.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :  
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2022 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Pasal 5

Keputusan Camat Ngebel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngebel

pada tanggal : 25 September 2021



CAMAT NGEBEL

YUSUB DHARMADI J., S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Ngebhel Kabupaten Ponorogo merupakan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) tahun kedepan Kecamatan Ngebhel.

Dalam Rencana Kerja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (2020) serta kebijakan, program, kegiatan, sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Ngebhel yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngebhel. Selain itu Renja sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA –PD) dan merupakan dokumen yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya sumber daya yang efisien, efektif dan berkelanjutan, juga digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 ).

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan perencanaan program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Ngebhel 1 (satu) tahun kedepan.

Ponorogo, 25 September 2021



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
TC 29	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
TC 30	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
TC 31	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	48
TC 32	
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>53</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	54
3.3. Program dan Kegiatan .....	55
TC 33	
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngebel Tahun 2022. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan Ngebel dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah untuk Tahun 2022 mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2022 berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.
19. Rencana Strategis Kecamatan Ngebek Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebek Tahun 2022 adalah :
  - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngebek Tahun 2022.

- Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngebel Tahun 2022.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2022 adalah :
- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngebel Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2022.
  - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan
  - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngebel dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Ngebel Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**

###### **LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  
TC.29
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
TC.30
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
TC.31

- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
TC.32

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
3.3 Program dan Kegiatan  
TC.33

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngebhel tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

##### 1. Tugas :

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja Kecamatan Ngebhel tahun 2020 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngebhel, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021. Adapun Pelaksanaan sebanyak 5 ( Lima ) Program dan 24 ( Dua Puluh Empat ) Kegiatan Kecamatan Ngebhel antara lain :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini berupa : pembayaran belanja listrik, telepon dan internet. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan pembayaran listrik, telepon dan internet dengan rencana 36 laporan terealisasi 36 laporan atau 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 7.140.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.265.954,- atau 87,76 %.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan belanja jasa tenaga kebersihan (1 orang). Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan pembayaran jasa kebersihan kantnror dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan atau 100%. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 12.800.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 12.800.000,- atau 100 %.

- c. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Kegiatan ini berupa belanja peralatan listrik dan penerangan kantor. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan pembayaran Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor dengan target 2 laporan terealisasi 2 laporan atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000 atau 100%.

- d. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini berupa : belanja Makan Minum pegawai. Indikator kegiatan ini adalah jumlah penerima makan dan minum harian pegawai dengan target 19 orang teralisasi 19 orang atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 34.060.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 34.060.000,- atau 100 %.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini berupa : belanja cetak, fotokopi, penjilidan, materai dan alat tulis kantor. Indikator kegiatan ini adalah

Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan target 1000 surat terealisasi 1.327 surat atau 132%. Jumlah laporan administrasi kepegawaian dengan target 17 laporan terealisasi 17 laporan atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp.19.684.900,- dapat terealisasi sebesar Rp. 19.684.000,- atau 99,99 %.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga.

Kegiatan ini berupa : belanja perbaikan peralatan kantor. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dengan target 3 unit terealisasi 3 unit atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 100 %.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan

Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja makan minum rapat, dan belanja honorarium non PNS. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dengan rencana sebanyak 6 orang dan terealisasi 6 orang atau 100%. Jumlah SPP LS yang dibuat dengan target 100 Dokumen terealisasi 106 Dokumen atau 106%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 39.900.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 39.900.000,- atau 100 %.

- f. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah. Indikator kegiatan ini Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti dengan rencana sebanyak 2 rapat dan terealisasi 2 rapat atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 14.086.000,- atau 93,91 %.

## **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung tempat Ibadah, gedung tempat rekreasi dan olahraga.

Kegiatan ini berupa : Belanja Modal pembangunan Mushola. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah fasilitas Umum yang terbangun ditempat wisata dengan rencana sebanyak 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 149.286.000,- atau 99,52 %.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas  
Kegiatan ini berupa : Jasa Service, Penggantian Suku Cadang Kendaraan, BBM, belanja STNK. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diperbaiki/dipelihara dengan rencana sebanyak 4 unit dan terealisasi 5 unit atau 125%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 22.763.114,- dapat terealisasi sebesar Rp. 22.760.086,- atau 99,99 %.

### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

- a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.  
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja makan minum rapat Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan dengan rencana sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 20 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100%.
- b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja makan minum rapat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun dengan rencana sebanyak 5 dokumen terealisasi 5 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 700.000,- atau 100 %.
- c. Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD.  
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja Makan dan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen perencanaan penyusunan Renstra dan Rencana

Kerja dengan rencana sebanyak 8 dokumen terealisasi 8 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 %.

#### **4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa.

Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah produk hukum desa yang tersusun dengan rencana 40 Produk hukum terealisasi 88 Produk Hukum atau 220%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100 %.

- b. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan

Kegiatan ini berupa : Belanja Makan Minum, Belanja peralatan kebersihan, dan belanja transport. Indikator kegiatan ini adalah :

Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pembinaan pemerintahan desa dengan target 8 desa terealisasi 8 desa (100%).

Jumlah SPPT/STTS PBB-P2 yang didistribusikan dengan target 17.162 lembar terealisasi 17.162 lembar (100%).

Prosentase pembayaran PBB tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100%

Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya Dengan target 8 Desa terealisasi 8 desa atau 100%.

Jumlah Desa yang difasilitasi penanganan dampak covid 19 Dengan target 8 Desa terealisasi 8 Desa atau 100%.

Dana yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp. 39.200.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 39.100.000,- atau 99,74 %.

- d. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Cetak dan Penggandaan, dan Belanja Makan Minum Rapat. Indikator

kegiatan ini adalah jumlah PKK Desa yang aktif dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 7.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100 %.

- e. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa .

Kegiatan ini berupa : Belanja Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan ADD dan DD dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100 %.

- f. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan  
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah Desa yang mengikuti kegiatan musrenbang dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %.

- g. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berupa :Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah :

Jumlah Desa yang dimonitoring kewilayahannya dengan target 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%.

Jumlah PKL di tempat wisata yang dibina dengan target 80 orang terealisasi 77 orang atau 96,25%.

Jumlah Kelompok bela diri yang difasilitasi dengan target 5 kelompok terealisasi 5 kelompok atau 100%.

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 %.

- j. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.  
Kegiatan ini berupa : Belanja pakai habis bahan makanan, belanja makan minum rapat/tamu. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah even budaya daerah dan kesenian yang

diikuti dengan rencana 4 even dan terealisasi 4 even atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 9.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau 100 %.

- k. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan peringatan kemerdekaan RI.

Kegiatan ini berupa :Belanja pakai habis alat peraga. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah even HUT RI yang difasilitasi dengan rencana 3 even dan terealisasi 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100 %.

- l. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat

Kegiatan ini berupa : Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi dan dekorasi, Belanja makan minum rapat/lembur. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pokja Desa Sehat yang difasilitasi. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 16.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 16.500.000,- atau 100 %.

- m. Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan ini berupa : Belanja sewa perlengkapan dan kesenian, Belanja penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dengan target 9 even terealisasi 9 even atau 100 %. Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 44.825.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 44.825.000,- atau 100 %.

## **5. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum**

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin Rapat. Indikator kegiatan ini adalah :

Jumlah SOP/SPP yang dibuat dengan target 38 SOP dan 1 SPP terealisasi 100%.

Jumlah berkas kependudukan dan surat rekomendasi yang diterbitkan dengan target 1.100 surat terealisasi 1.090 atau 99,09 %.

Jumlah informasi Publik yang diupload dengan target 20 data terealisasi 16 Data atau 80%.

Dana yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100 %.

Evaluasi diatas perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang di dalam Renstra dan telah diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya, serta proyeksi tahun yang akan datang, secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel T-C 29 berikut ini :

Tabel TC-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan) Kabupaten Ponorogo**

## KECAMATAN NGBEL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2 ) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun ( n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 ( n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.4. 01.18.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok &amp; fungsi</b>		100%	100%	100%	100%		100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon		12 Lap	36 Lap	36 Lap	100		72 Lap	66,67
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah laporan pembayaran jasa kebersihan Kantor		12 Lap	12 Lap	14 Lap	116		50 Lap	83,33
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan pembayaran komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang dibeli		1 paket	2 Lap	2 Lap	100		5 Lap	100
	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah penerima makan dan minum harian		17 orang	19 Orang	19 Orang	100		75 Orang	81,52
	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		-	1000 Surat	1.327 Surat	132		4216 Surat	106,73
		Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		-	17 Lap	17 Lap	100		17 Lap	100
	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		3 Unit	3 Unit	3 Unit	100		21 Unit	65,63

	Penyediaan jasa administrasi keuangan/teknis kegiatan	Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan		8 Orang	6 Orang	6 Orang	100		28 Orang	82,35
		Jumlah SPP LS yang dibuat		-	100 Dok	106 Dok	106		106 Dok	88,33
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan		9 Rapat	2 rapat	4 rapat	200		27 rapat	77,14
<b>4.01.4. 01.18.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		6 Unit	4 Unit	5 Unit	125		19 Unit	83
	Pembangunan gedung tempat ibadah, gedung tempat rekreasi dan olahraga	Jumlah fasilitasi umum yang terbangun di tempat wisata		2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100		2 Gedung	100
<b>4.01.4.01.18.06</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		8 Dokuemn	20 dokumen	20 dokumen	100		40 Dokumen	66,67
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan akhir ahun yang disusun		5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100		10 Dokumen	40,00
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		2 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100		16 Dokumen	66,67
	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85,97</b>	<b>101%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat	Jumlah SOP/SPP yang diterbitkan waktu		-	39 Dokumen	50 Dokumen	100		<b>50 Dokumen</b>	77,19
		Jumlah Berkas Kependudukan, Surat Rekomendasi yang diterbitkan		-	1100 Surat	1090 Surat	99,09		<b>1090 Surat</b>	99,09
		Jumlah Informasi Publik yang diupload		-	20 Data	16 Data	80		<b>16 Data</b>	80,00

4.01.4.01.18.20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase desa yang meningkat skor IDMnya		85%	86%	87,5%	101	85%	85%	-
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun		40	40 Dokumen	88 dokumen	220		224 Dokumen	112
	Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Desa sasaran sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan		-	8 Desa	8 Desa	100		32 Desa	80
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan		-	17.162 op	17.162 op	100		17162 op	100
		Prosentase Pembayaran PBB tepat Waktu		-	100%	100%	100		100%	100
		Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam		-	8 desa	8 desa	100		8 desa	100
		Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan penanganan dampak Wabah Covid 19		-	8 desa	8 desa	100		8 desa	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK Aktif		8 Desa	8 Desa	8 desa	100		32 Desa	80
	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibi- na dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD		8 Desa	8 Desa	8 Desa	100		32 Desa	80
		Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan SPJ ADD dan DD		8 Desa	8 Desa	8 desa	100		32 Desa	80
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang		8 Desa	8 Desa	8 desa	100		32 Desa	80
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan kewilayahan		8 desa	8 desa	8 desa	100		32 desa	80
		Jumlah Pedagang kaki Lima yang dibina		-	80 orang	77 orang	96,25		77 orang	96,25
		Jumlah Kelompok Bela Diri yang difasilitasi		5 kel	5 kel	5 kel	100		10 kel	66,67
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah event kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan /diikuti		3 Event	4 Event	4 Event	100		12 Event	46,15

	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI		4 Event	1 Event	1 Event	100		9 Event	75
	Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi		9 Pokja	8 Pokja	8 Pokja	100		17 Pokja	65,38
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah fasilitasi Keagamaan yang dilaksanakan		-	9 Even	9 Even	100		9 Even	25
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%					100%		
		Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%					100%		
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%					100%		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	100%					100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	8 Dokumen					8 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20 Dokumen					20 Dokumen		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun</b>	100%					100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	16 orang					16 orang		

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan dan teknis Kegiatan	5 Orang					5 Orang		
		Jumlah SPP yang dibuat	100					100 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen					5 Dokumen		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keakuratan Data Kepegawaian</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan	Jumlah Penerima Pakaian Dinas	19 Orang					19 Orang		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	0					0		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0					0		
	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	4 laporan					4 laporan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	0					0		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 paket					12 paket		
		Jumlah Laporan Penerimaan makan minum harian	12 laporan					12 laporan		
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	11 rapat					11 rapat		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 paket					4 paket		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	2 rapat					2 rapat		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli	0					0		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1000 Surat					1000 Surat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan	12 laporan					12 laporan		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit					4 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 item					3 item		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit					1 Unit		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya</b>	<b>86%</b>					<b>86%</b>		

	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjuti</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perayaan HUT RI, Grebeg Suro, Kec Sehat )	Jumlah event kesenian/kebudayaan daerah	2 Event					2 Event		
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI	2 Event					2 Event		
		Jumlah Desa yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.	8 Desa					8 Desa		
		Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	8 Pokja					8 Pokja		
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah SOP yang diterbitkan	38 Dokumen					38 Dokumen		
		Jumlah SPP yang diterbitkan	1 Dokumen					1 Dokumen		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah berkas kependudukan,surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan	1000 Dokumen					1000 Dokumen		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Data Informasi Pelayanan/kegiatan yang diupload	12 data					12 data		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana</b>	<b>Prosentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		

	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan	12 Laporan					12 Laporan		
		Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli	4 paket					4 paket		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan BBGRM dan Lomba Desa )	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM	8 desa					8 desa		
Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa		8 desa					8 desa			
Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi		8 desa					8 desa			
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitas lintas sektor dan FKPSB	6 Fasilitas					6 Fasilitas		
		Jumlah Laporan penanganan gangguan trantibum	1 Kasus					1 Kasus		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		

	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitas kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	1 Fasilitas					1 Fasilitas		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa yang di fasilitasi, supervisi dan monev penanganan covid 19	8 Desa					8 Desa		
Jumlah Fasilitas Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa		4 Fasilitas					4 Fasilitas			
Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD		8 Desa					8 Desa			
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>	<b>75%</b>					<b>75%</b>		
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun	40 Dokumen					40 Dokumen		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasi tata pemerintahannya	8 desa					8 desa		

		Jumlah Laporan Kependudukan yang disusun	12 Laporan					12 Laporan		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan	8 desa					8 desa		
		Jumlah Desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring	8 desa					8 desa		
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan	18.150					18.150		
		Prosentase Pembayaran PBB tepat waktu	100%					100%		
	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum	12 laporan					12 laporan		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monitoring keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan	12 laporan					12 laporan		
		Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina ditempat wisata	70 Orang					70 Orang		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang	8 desa					8 desa		
		Jumlah desa yang meyusun profil desa	8 Desa					8 Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK )	Jumlah PKK Desa yang dibina	8 desa					8 desa		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngebel berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngebel dapat dilihat dari indikator kinerja :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ngebel memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Ngebel
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Ngebel;

13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Ngebel;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ngebel;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kecamatan Ngebel adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam tabel T-C 30.

Tabel TC 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel  
Kabupaten Ponorogo**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 ( thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok &amp; fungsi</b>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan pembayaran listrik, air & telepon			36 Lap				36 Lap				
	Jumlah laporan pembayaran jasa kebersihan Kantor			12 Lap				14 Lap				
	Jumlah Laporan pembayaran komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang dibeli			2 Lap				2 Lap				
	Jumlah penerima makan dan minum harian			19 Orang				19 Orang				
	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola			1.000 Surat				1.327 Surat				
	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Tepat Waktu			17 Lap				17 Lap				
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki			3 Unit				3 Unit				
	Jumlah penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan			6 Orang				6 Orang				
	Jumlah SPP LS yang dibuat			100 Dok				106 Dok				
	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan			2 rapat				4 rapat				
	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi</b>			100%				100%				
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			4 Unit				5 Unit				

Jumlah fasilitasi umum yang terbangun di tempat wisata		2 Gedung			2 Gedung			
<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>		100%			100%			
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		20 dokumen			20 dokumen			
Jumlah pelaporan akhir ahun yang disusun		5 dokumen			5 dokumen			
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		8 dokumen			8 dokumen			
<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi</b>		85			85,97			
Jumlah SOP/SPP yang diterbitkan waktu		39 Dokumen			50 Dokumen			
Jumlah Berkas Kependudukan, Surat Rekomendasi yang diterbitkan		1100 Surat			1090 Surat			
Jumlah Informasi Publik yang diupload		20 Data			16 Data			
<b>Prosentase desa yang meningkat skor IDNnya</b>		40 Dokumen			88 dokumen			
Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun		8 Desa			8 Desa			-
Jumlah Desa sasaran sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan		17.162 op			17.162 op			
Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan		100%			100%			
Prosentase Pembayaran PBB tepat Waktu		8 desa			8 desa			
Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam		8 desa			8 desa			
Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan penanganan dampak Wabah Covid 19		8 Desa			8 desa			
Jumlah PKK Aktif		8 Desa			8 Desa			
Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD		8 Desa			8 desa			

Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan SPJ ADD dan DD			8 Desa				8 desa				
Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang			8 desa				8 desa				
Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan kewilayahan			80 orang				77 orang				
Jumlah Pedagang kaki Lima yang dibina			5 kel				5 kel				
Jumlah Kelompok Bela Diri yang difasilitasi			4 Event				4 Event				
Jumlah event kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti			1 Event				1 Event				
Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI			8 Pokja				8 Pokja				
Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi			9 Even				9 Even				
Jumlah fasilitas Keagamaan yang dilaksanakan			40 Dokumen				88 dokumen				
<b>Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok &amp; fungsi</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun				8 Dokumen	8 Dok	8 Dok		8 Dokumen	8 Dok	8 Dok	
Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				20 Dokumen	6 Dok	6 Dok		20 Dokumen	6 Dok	6 Dok	
<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				16 orang	17 Orang	17 Orang		16 orang	17 Orang	17 Orang	
Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan dan teknis Kegiatan				5 Orang	5 Orang	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5 Orang	
Jumlah SPP yang dibuat				100 Dokumen	100 Dok	100 Dok		100 Dokumen	100 Dok	100 Dok	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu				5 Dokumen	5 Dok	5 Dok		5 Dokumen	5 Dok	5 Dok	
<b>Persentase Keakuratan Data Kepegawaian</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Jumlah Penerima Pakaian Dinas				19 Orang	19 orang	20 Orang		19 Orang	19 orang	20 Orang	
Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat				0	12 Laporan	12 Laporan		0	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				0	1 Orang	1 Orang		0	1 Orang	1 Orang	
<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Jumlah Laporan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli				4 laporan	4 Paket	4 Paket		4 laporan	4 Paket	4 Paket	
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli				0	3 item	4 item		0	3 item	4 item	
Jumlah Peralatan Rumah tangga yang dibeli				-	2 item	2 Item		-	2 item	2 Item	
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				12 paket	6 paket	6 paket		12 paket	6 paket	6 paket	
Jumlah Laporan Penerimaan makan minum harian				12 laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah rapat koordinasi yang				11 rapat	20 rapat	20 rapat		11 rapat	20 rapat	20 rapat	
Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu				-	5 fasilitasi	5 fasilitasi		-	5 fasilitasi	5 fasilitasi	
Jumlah Dokumen fasilitasi inovasi berbasis elektronik				-	1 Dokumen	1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				4 paket	4 paket	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	
Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti				2 rapat	3 rapat	4 rapat		2 rapat	3 rapat	4 rapat	
<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
Jumlah Mebelair yang dibeli				0	2 item	3 item		0	2 item	3 item	

	<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola				1000 Surat	1200 dok	1200 dok		1000 Surat	1200 dok	1200 dok	
	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan				12 laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				4 unit	2 Unit	2 Unit		4 unit	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki				3 item	3 Unit	3 Unit		3 item	3 Unit	3 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	<b>Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>				75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	<b>Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun</b>				100%	75%	75%		100%	75%	75%	
	Jumlah SOP yang diterbitkan				38 Dokumen	38 Dok	38 Dok		38 Dokumen	38 Dok	38 Dok	
	Jumlah SPP yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dok	1 Dok		1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah berkas kependudukan, surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan				1000 Dokumen	750 Dok	1000 Dok		1000 Dokumen	750 Dok	1000 Dok	
	Jumlah Data Informasi Pelayanan/kegiatan yang diupload				12 data	-	-		12 data	-	-	
	Jumlah Fasilitas/Koordinasi peningkatan pelayanan umum				-	4 rapat	4 rapat		-	4 rapat	4 rapat	
	<b>Prosentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara</b>				100%	100%	100%		100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli				4 paket	4 paket	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	

	<b>Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya</b>				86%	75%	75%		86%	75%	75%	
	<b>Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjuti</b>				100%	75%	75%		100%	75%	75%	
	Jumlah event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti				2 Event	4 Event	4 Event		2 Event	4 Event	4 Event	
	Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI				2 Event	4 Event	4 Event		2 Event	4 Event	4 Event	
	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.				8 Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi		8 Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	
	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi				8 Pokja	-	-		8 Pokja	-	-	
	Jumlah fasilitasi pembinaan bidang pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak				-	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi		-	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	
	Jumlah pembinaan kesehatan/ gizi/pemberantasan penyakit menular				-	8 Pokja	8 Pokja		-	8 Pokja	8 Pokja	
	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>				75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya</b>				75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM				8 desa	8 desa	8 desa		8 desa	8 desa	8 desa	
	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa				8 desa	8 desa	8 desa		8 desa	8 desa	8 desa	
	Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi				8 desa	-	-		8 desa	-	-	
	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya</b>				-	75%	75%		-	75%	75%	
	Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatan ekonominya				-	8 kel	10 kel		-	8 kel	10 kel	

	Jumlah desa yang dibina produksi/ distribusi hasil produksinya			-	8 desa	8 desa		-	8 desa	8 desa	
	<b>Prosentase desa yang meningkat ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>			75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas</b>			75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	Jumlah Fasilitasi lintas sektor dan FKPSB			6 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi		6 Fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi	
	Jumlah Laporan penanganan gangguan trantibum			1 Kasus	-	-		1 Kasus	-	-	
	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>			75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	<b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang</b>			75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan			1 Fasilitasi	2 event	2 event		1 Fasilitasi	2 event	2 event	
	Jumlah desa yang di fasilitasi, supervisi dan monev penanganan covid 19			8 Desa	-	-		8 Desa	-	-	
	Jumlah Fasilitasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa			4 Fasilitasi	8 fasilitasi	8 fasilitasi		4 Fasilitasi	8 fasilitasi	8 fasilitasi	
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD			8 Desa	-	-		8 Desa	-	-	
	Jumlah fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum			-	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi		-	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	
	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>			75%	75%	75%		75%	75%	75%	
	<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>			100%	75%	75%		100%	75%	75%	
	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun			40 Dokumen	40 Dok	40 Dok		40 Dokumen	40 Dok	40 Dok	

Jumlah Desa yang dibina administrasi tata pemerintahannya			8 desa	12 laporan	12 laporan		8 desa	12 laporan	12 laporan	
Jumlah Laporan Kependudukan yang disusun			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya			8 desa	8 Desa	8 Desa		8 desa	8 Desa	8 Desa	
Jumlah Desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD			8 desa	8 Desa	8 Desa		8 desa	8 Desa	8 Desa	
Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan			18.150	18,153	18,153		18.150	18,153	18,153	
Prosentase Pembayaran PBB tepat waktu			100%	100%	100%		100%	100%	100%	
Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum			12 laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah penyuluhan peraturan perundangan			-	2 rapat	2 rapat		-	2 rapat	2 rapat	
Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.			-	1 Desa	-		-	1 Desa	-	
Jumlah monitoring keamanan dan keteriban wilayah kecamatan			12 laporan	-	-		12 laporan	-	-	
Jumlah pembinaan sospol /ideologi negara/kesbang/perlindungan dan keteriban masyarakat			-	4 rapat	4 rapat		-	4 rapat	4 rapat	
Jumlah patroli/monitoring pencegahan gangguan trantibum/ penanggulangan bencana yang dilaksanakan			-	12 laporan	12 laporan		-	12 laporan	12 laporan	
Jumlah laporan kejadian/pelaksanaan tugas trantibum			-	12 laporan	12 laporan		-	12 laporan	12 laporan	
Jumlah fasilitasi pengamanan kantor dan rumah dinas Camat			-	12 fasilitasi	12 fasilitasi		-	12 fasilitasi	12 fasilitasi	
Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina ditempat wisata			70 Orang	-	-		70 Orang	-	-	
Jumlah desa yang mengikuti musrenbang			8 desa	8 desa	8 desa		8 desa	8 desa	8 desa	
Jumlah desa yang menyusun profil desa			-	8 desa	8 desa		-	8 desa	8 desa	
Jumlah PKK Desa yang dibina			-	8 Desa	8 Desa		-	8 Desa	8 Desa	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Ngebel sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) Keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Ponorogo adalah “ **MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas Amanah dan Takwa)**”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi Nawa Darma Nyata Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nawa Darma Nyata terdiri dari:

- 1 Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
- 2 Mencetak Generasi, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3 Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
- 4 Memberdayakan Perempuan dan perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
- 5 Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reog;

- 6 Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
- 7 Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
- 8 Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
- 9 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut :

**Misi 1 :**

Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;

**Misi 2 :**

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;

**Misi 3:**

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;

**Misi 4:**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, **Kecamatan Ngebhel merujuk pada misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngebhel, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan

adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam

meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah Kebijakan Kecamatan Ngebel adalah mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Review tersebut digambarkan pada tabel T-C. 31 berikut :

Tabel TC 31  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Ponorogo**

**KECAMATAN NGEBEL**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. NGEBEL	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	1.953.601.650,94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEC. NGEBEL	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	1.953.601.650,94	
			Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%				Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		
			Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%				Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun	8 Dok	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun	8 Dok	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Dok	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	100%	1.547.788.096	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	100%	1.547.788.096	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.510.788.095,94	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.510.788.095,94	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan Teknis Kegiatan	5 Orang	36.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan Teknis Kegiatan	5 Orang	36.000.000	
			Jumlah surat permintaan pembayaran langsung SPP yang tersusun	100 Dok			Jumlah surat permintaan pembayaran langsung SPP yang tersusun	100 Dok			

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5 Dok	1.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase keakuratan data kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>13.500.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase keakuratan data kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>13.500.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penerima Pakaian Dinas	19 orang	7.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Penerima Pakaian Dinas	19 orang	7.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan/pembinaan administrasi kepegawaian	12 Laporan	1.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan/pembinaan administrasi kepegawaian	12 Laporan	1.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	1 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	1 Orang	5.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>187.313.555</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>187.313.555</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	2.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 item	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 item	40.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	2 item	38.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	2 item	38.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah laporan penerimaan makanan dan minuman harian	12 Laporan	80.313.555	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah laporan penerimaan makanan dan minuman harian	12 Laporan	80.313.555	
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	20 rapat				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	20 rapat		
		Jumlah ATK yang tersedia	6 paket				Jumlah ATK yang tersedia	6 paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 paket	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 paket	4.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	5 fasilitasi	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	5 fasilitasi	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	3 rapat	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	3 rapat	15.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen fasilitasi Inovasi berbasis elektronik	1 Dokumen	3.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen fasilitasi Inovasi berbasis elektronik	1 Dokumen	3.000.000	

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	
Pengadaan Mebel		Jumlah Mebelair yang dibeli	2 item	25.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebelair yang dibeli	2 item	25.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>17.500.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>17.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1200 dok	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1200 dok	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan pembayaran listrik,telepon/internet dan air yang dibayarkan	12 Laporan	12.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan pembayaran listrik,telepon/internet dan air yang dibayarkan	12 Laporan	12.500.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>158.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>158.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	57.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	57.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki	3 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki	3 Unit	1.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 Unit	100.000.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>75%</b>	<b>22.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>75%</b>	<b>22.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase dokumen perencanaan/pelaksanaan pelayanan yang disusun</b>	<b>75%</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Prosentase dokumen perencanaan/pelaksanaan pelayanan yang disusun</b>	<b>75%</b>	<b>7.000.000</b>	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah SOP yang diterbitkan	38 Dok	2.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah SOP yang diterbitkan	38 Dok	2.000.000	
		Jumlah SPP yang diterbitkan	1 Dok				Jumlah SPP yang diterbitkan	1 Dok		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah berkas Kependudukan ,surat keterangan/rekomen dasi yang diterbitkan/ didokumentasikan	750 Dok	3.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah berkas Kependudukan ,surat keterangan/rekomen dasi yang diterbitkan/ didokumentasikan	750 Dok	3.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi/koordinasi peningkatan pelayanan umum	4 rapat	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi/koordinasi peningkatan pelayanan umum	4 rapat	2.000.000	

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Prosentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara	100%	15.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Prosentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara	100%	15.000.000	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		Jumlah penerima jasa kebersihan	12 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		Jumlah penerima jasa kebersihan	12 Laporan	15.000.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	75%	110.337.880	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti	75%	110.337.880	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah fasilitasi event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti	4 Event	110.337.880	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah fasilitasi event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti	4 Event	110.337.880	
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI	4 Event				Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI	4 Event		
		Jumlah fasilitasi pembinaan bidang pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak	4 fasilitasi				Jumlah fasilitasi pembinaan bidang pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak	4 fasilitasi		
		Jumlah difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.	12 fasilitasi				Jumlah difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.	12 fasilitasi		
		Jumlah pembinaan kesehatan/ gizi/pemberan tasan penyakit menular	8 Pokja				Jumlah pembinaan kesehatan/ gizi/pemberan tasan penyakit menular	8 Pokja		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>		<b>7.500.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>		<b>7.500.000</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya	75%	3.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya	75%	3.500.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM	8 desa	3.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM	8 desa	3.500.000	

		Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan/ lingkungan hidup	8 desa				Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan/ lingkungan hidup	8 desa		
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa	8 desa				Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa	8 desa		
		<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya</b>	<b>75%</b>	<b>4.000.000</b>			<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya</b>	<b>75%</b>	<b>4.000.000</b>	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 kel	2.000.000			Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatan ekonominya	8 kel	2.000.000	
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8 desa	2.000.000			Jumlah desa yang dibina produksi/ distribusi hasil produksinya	8 desa	2.000.000	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>			<b>Prosentase desa yang meningkat ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>			<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Fasilitasi	2.000.000			Jumlah fasilitasi dan koordinasi trantibum dengan instansi vertikal/lintas sektor yang dilaksanakan	3 Fasilitasi	2.000.000	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>75%</b>	<b>44.200.000</b>			<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>	<b>75%</b>	<b>44.200.000</b>	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>44.200.000</b>			<b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>44.200.000</b>	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 event	15.000.000			Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	2 event	15.000.000	

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitasi dan pembinaan ke Pemerintah Desa bersama Forpimka	8 fasilitasi	29.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah fasilitasi dan pembinaan ke Pemerintah Desa bersama Forpimka	8 fasilitasi	29.200.000	
		Jumlah fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	3 Fasilitasi				Jumlah fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	3 Fasilitasi		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KEC NGEBEL</b>	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KEC NGEBEL</b>	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Produk hukum desa yang disusun	40 Dok	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Produk hukum desa yang disusun	40 Dok	2.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 laporan	2.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12 laporan	2.000.000	
		Jumlah fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan dan pertanahan yang dilaksanakan	12 Laporan				Jumlah fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan dan pertanahan yang dilaksanakan	12 Laporan		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya	8 Desa	2.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya	8 Desa	2.000.000	
		Jumlah desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD/DD	8 Desa				Jumlah desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD/DD	8 Desa		
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu	18,153				Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu	18,153		
		Prosentase pembayaran PBB tepat waktu	100%				Prosentase pembayaran PBB tepat waktu	100%		
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum	12 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum	12 Laporan	12.000.000	
		Jumlah penyuluhan peraturan perundangan	2 rapat				Jumlah penyuluhan peraturan perundangan	2 rapat		

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.	1 Desa	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.	1 Desa	2.000.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya	1 Desa	2.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya	1 Desa	2.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pembinaan sospol /ideologi negara/kesbang /perlindungan dan ketertiban masyarakat	4 rapat	3.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pembinaan sospol /ideologi negara/kesbang /perlindungan dan ketertiban masyarakat	4 rapat	3.000.000	
		Jumlah patroli/monitoring pencegahan gangguan trantibum/ penanggulangan bencana yang dilaksanakan	12 laporan				Jumlah patroli/monitoring pencegahan gangguan trantibum/ penanggulangan bencana yang dilaksanakan	12 laporan		
		Jumlah laporan kejadian/pelaksanaan tugas trantibum	12 laporan				Jumlah laporan kejadian/pelaksanaan tugas trantibum	12 laporan		
		Jumlah fasilitasi pengamanan kantor dan rumah dinas Camat	12 fasilitasi				Jumlah fasilitasi pengamanan kantor dan rumah dinas Camat	12 fasilitasi		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah desa yang mengikuti musrenbang	8 desa	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah desa yang mengikuti musrenbang	8 desa	5.000.000	
		Jumlah desa yang menyusun profil desa	8 desa				Jumlah desa yang menyusun profil desa	8 desa		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah PKK Desa yang dibina	8 Desa	9.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah PKK Desa yang dibina	8 Desa	9.000.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat dukuh dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawah ke forum Musrenbangdes. Di forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Hal tersebut bisa dilihat pada table TC.32 :

Tabel T-C.32  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN PONOROGO**

KECAMATAN NGBEL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	Volume	Satuan	CATATAN
				RT/RW/DESA				
1	Pembangunan Drainase	2	2	Gondowido	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
2	Pembangunan Talud	1	3	Gondowido	Jumlah panjang talud yang dibangun	100	meter	PUPR
3	Rehab Aspal	1	3	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang direhap	1000	meter	PUPR
4	Pembangunan Rabat Beton	2	3	Gondowido	Jumlah Panjang Jalan yang dirabat	500	meter	PUPR
5	Rehab Aspal	2	2	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang direhap	1000	meter	PUPR
6	Pengaspalan Jalan	2	1	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang di aspal	1000	meter	PUPR
7	Pengaspalan Jalan	2	2	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang di aspal	1000	meter	PUPR
8	Pengadaan Tempat Sampah	0	0	Gondowido	Jumlah Peralatan yang dibeli	1	unit	Dinas LH
9	Rehab Jaringan Air Minum	2	1	Ngebel	Jumlah panjang jaringan air minum	1500	meter	PUPR
10	Pengadaan Dam Pengendali / Bronjong	1	1	Ngebel	Jumlah Bronjong yang dibeli	2	unit	PUPR
11	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Ngebel	Jumlah panjang drainase yang dibangun	200	meter	PUPR
12	Tempat Pembuangan Sampah Sementara ( TPS )	2	1	Ngebel	Jumlah TPS yang dibangun	1	unit	Dinas LH
13	Talud Badan Jalan	1	1	Ngebel	Jumlah Panjang Talud badan jalan yang dibangun	225	meter	PUPR
14	Pengadaan Dam Pengendali / Bronjong	1	1	Ngebel	Jumlah Dam Pengendali yang dibeli	2	unit	PUPR
15	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Ngebel	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
16	Pengadaan Lampu Jalan	0	0	Ngebel	Jumlah Lampu Jalan yang dibeli	100	unit	Dinas Perhubungan
17	Pengadaan Tempat Sampah	1	1	Ngebel	Jumlah Tempat Sampah yang dibeli	50	unit	Dinas LH
18	Pengadaan alat pengolahan Duren dan Pelatihan	0	0	Ngebel	Jumlah panjang dan Pelatihan yang dibangun	1	unit	Perdakum

19	Pembangunan Rabat Jalan	1	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
20	Pembangunan Rabat Jalan	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	10000	meter	PUPR
21	Pembangunan Rabat Jalan	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	750	meter	PUPR
22	Pembangunan Talud	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Talud yang dibangun	50	meter	PUPR
23	Pembangunan Talud	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Talud yang dibangun	75	meter	PUPR
24	Pengembangan Wisata Agro	0	0	Ngrogung	Jumlah panjang Wisata Agro yang dibangun	1	unit	Dinas Pariwisata
25	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Pupus	Jumlah panjang Drainase yang dibangun	300	meter	PUPR
26	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Pupus	Jumlah panjang Drainase yang dibangun	1000	meter	PUPR
27	Pengaspalan Jalan	3	2	Pupus	Jumlah panjang Jalan yang diaspal	500	meter	PUPR
28	Pengaspalan Jalan	1	1	Pupus	Jumlah panjang Jalan yang diaspal	500	meter	PUPR
29	Pembangunan Talud	3	2	Pupus	Jumlah panjang talud yang dibangun	500	meter	PUPR
30	Pembangunan Talud	2	1	Pupus	Jumlah Panjang Talud yang dibangun	500	meter	PUPR
31	Pembangunan Talud	2	1	Pupus	Jumlah Panjang Talud yang dibangun	500	meter	PUPR
32	Pengaspalan Jalan/Hotmix	0	0	Pupus	Jumlah panjang jalan yang diaspal	6000	meter	PUPR
33	Pengadaan Bibit Buah Kebun Desa/ wisata Agro	0	0	Pupus	Jumlah bibit buah yang dibeli	1500	batang	Dinas Pertanian
34	Pembangunan saluran	1	1	Sahang	Jumlah Panjang saluran yang dibangun	20	meter	PUPR
35	Peningkatan Jalan	1	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	1911	meter	PUPR
36	Pengadaan Jalan Intensifikasi Usaha Tani	1	1	Sahang	Jumlah panjang Jalan yang dibangun	2000	meter	PUPR
37	Talud Jalan Bandongan	2	1	Sahang	Jumlah panjang talud yang dibangun	12	meter	PUPR
38	Pembangunan Jaringan Saluran Air Minum	0	0	Sahang	Jumlah panjang jaringan air minum yang dibangun	7550	meter	PUPR
39	Peningkatan Jalan Poros Desa	1	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan poros desa yang dibangun	600	meter	PUPR
40	Talud Penahan tebing	1	2	Sahang	Jumlah panjang talud yang dibangun	400	meter	PUPR

41	Pengadaan Bibit Durian dan Cengkeh	0	0	Sahang	Jumlah Bibit durian dan Cengkeh yang dibeli	10000	batang	Dinas Pertanian
42	Peningkatan Jalan Poros Desa Rijit	3	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan poros desa yang dibangun	500	meter	PUPR
43	Pembangunan Rabat Jalan	2	2	Sempu	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	600	meter	PUPR
44	Pembangunan Talud Jalan	2	2	Sempu	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	150	meter	PUPR
45	Pembangunan Talud Jalan	2	1	Sempu	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
46	Pembangunan Saluran	1	2	Sempu	Jumlah Panjang saluran yang dibangun	200	meter	PUPR
47	Pengadaan Bibit Tanaman Buah	0	0	Sempu	Jumlah bibit buah yang dibeli	1000	batang	Dinas Pertanian
48	pengadaan alat pengolah kripik dan pelatihan	0	0	Sempu	Jumlah alat pengolahan yang dibeli	1	unit	Perdakum
49	Pengaspalan Jalan	1	1	Talun	Jumlah panjang jalan yang diaspal	2000	meter	PUPR
50	Pembangunan Rabat Beton Watumaling	1	2	Talun	Jumlah panjang rabat jalan yang dibangun	500	meter	PUPR
51	Pembangunan Rabat Beton Tritis	1	2	Talun	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	500	meter	PUPR
52	Pembangunan Talud Jalan	1	2	Talun	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	83	meter	PUPR
53	Pengadaan alat pengolahan produk unggulan	0	0	Talun	Jumlah alat pengolahan yang dibeli	2	unit	Perdakum
54	Pembangunan Talud penahan jalan masuk SMP 1 Atap	0	0	Talun	Jumlah panjang talud yang dibangun	30	meter	PUPR
55	Pembangunan Drainase / Saluran	0	0	Talun	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun	1000	meter	PUPR
56	Pembangunan Drainase / Saluran	1	2	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	2000	meter	PUPR
57	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
58	Pembangunan Drainase / Saluran	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	600	meter	PUPR

59	Pembangunan Talud Jalan	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
60	Pembangunan Talud Jalan	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	150	meter	PUPR
61	Pembangunan Pasar Wisata	0	0	Wagir Lor	Jumlah unit pasar wisata yang dibangun	3	unit	Dinas Pariwisata
62	Pelatihan Kelompok Wanita Tani ( aneka kripik)	0	0	Wagir Lor	Jumlah kelompok pelatihan	5	kelompok	Perdakum
63	MCK Umum / wisata	0	0	Wagir Lor	Jumlah MCK yang dibangun	20	unit	PUPR
64	Pembangunan Talud Jalan	2	1	Wagir Lor	Jumlah panjang talud yang dibangun	200	meter	PUPR
65	Pengadaan alat pembuatan kue	0	0	Wagir Lor	Jumlah alat pembuat kue	5	unit	Perdakum

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan memper timbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Ngebel dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien .
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Ngebel dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah Letak geografis wilayah Kecamatan Ngebel berada dalam ketinggian 734 meter

dipermukaan laut sangat baik dari sisi Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan. Kecamatan Ngebel juga mempunyai Cagar Budaya di Wilayah Desa Pupus berupa Air Terjun Toyomarto, Pemandian Air Panas di Desa Wagir Lor serta sebuah Telaga Ngebel yang sangat mempesona. Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Ngebel. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Ngebel serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Ngebel Tahun 2021-2026.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Ngebel mempunyai *tujuan* : **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi .

Dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Dengan indikator : Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan menjadi 6 (Enam) program, 15 ( Lima belas) kegiatan dan 42 ( Empat Puluh Dua ) Sub Kegiatan Kecamatan Ngebel adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Ngebel sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 6) Penyediaan Peralatan rumah tangga
  - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 8) Dukungan Pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan ;
- 1) Pengadaan mebel;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak

- Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan dinas Jabatan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1)Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
  - 2)Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
  - 3)Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1)Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan pihak swasta;

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1) Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - 2) Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Sub Kegiatan :
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah

Kecamatan

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional ;
  - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan;

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa;
  - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
  - 3) Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
  - 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif
  - 7) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 8) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - 9) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Tabel perumusan program dan kegiatan tersaji dalam lampiran tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Ponorogo**

## KECAMATAN NGBEL

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022				Catan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi	Kec Ngebel	100%	1.953.601.650,94			100%	2.009.614.960,79
		Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kec Ngebel	100%				100%	
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Kec Ngebel	100%				100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		100%	4.000.000			100%	4.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun		8 Dok	2.000.000			8 Dok	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		6 Dok	2.000.000			6 Dok	2.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100%	1.547.788.096			100%	1.608.301.406
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN		17 Orang	1.510.788.095,94			17 Orang	1.570.801.405,79
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan Teknis Kegiatan		5 Orang	36.000.000			5 Orang	36.000.000
		Jumlah surat permintaan pembayaran langsung SPP yang tersusun		100 Dok				100 Dok	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu		5 Dok	1.000.000			5 Dok	1.500.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase keakuratan data kepegawaian		100%	13.500.000			100%	13.500.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas		19 orang	7.000.000			20 Orang	7.000.000

7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan/pembinaan administrasi kepegawaian		12 Laporan	1.500.000			12 Laporan	1.500.000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		1 Orang	5.000.000			1 Orang	5.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>187.313.555</b>			<b>100%</b>	<b>174.313.555</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		4 Paket	2.000.000			4 Paket	2.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		3 item	40.000.000			4 item	35.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli		2 item	38.000.000			3 item	30.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penerimaan makanan dan minuman harian		12 Laporan	80.313.555			12 Laporan	80.313.555
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		20 rapat				20 rapat	
		Jumlah ATK yang tersedia		6 paket				6 paket	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		4 paket	4.000.000			4 paket	4.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu		5 fasilitasi	5.000.000			5 fasilitasi	5.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		3 rapat	15.000.000			4 rapat	15.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen fasilitasi Inovasi berbasis elektronik		1 Dokumen	3.000.000			1 Dokumen	3.000.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli		2 item	25.000.000			3 item	30.000.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>17.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>21.000.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		1200 dok	5.000.000			1200 dok	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan		12 Laporan	12.500.000			12 Laporan	15.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>158.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>158.500.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		2 Unit	57.000.000			2 Unit	57.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki		3 Unit	1.500.000			3 Unit	1.500.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara		1 Unit	100.000.000			1 Unit	100.000.000

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>22.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>22.000.000</b>
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase dokumen perencanaan/pelaksanaan pelayanan yang disusun		75%	7.000.000			75%	7.000.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterbitkan		38 Dok	2.000.000			38 Dok	2.000.000
		Jumlah SPP yang diterbitkan		1 Dok			1 Dok		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah berkas kependudukan, surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan/didokumentasikan		750 Dok	3.000.000			1000 Dok	3.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi/koordinasi peningkatan pelayanan umum		4 rapat	2.000.000			4 rapat	2.000.000
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Prosentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara</b>		<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa kebersihan		12 Laporan	15.000.000			12 Laporan	15.000.000
		Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia		4 paket			4 paket		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>			<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti</b>		<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>			<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti		4 Event	110.337.880			4 Event	110.337.880
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI		4 Event			4 Event		
		Jumlah fasilitasi pembinaan bidang pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak		4 fasilitasi			4 fasilitasi		
		Jumlah difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.		12 fasilitasi			12 fasilitasi		
		Jumlah pembinaan kesehatan/ gizi/pemberantasan penyakit menular		8 Pokja			8 Pokja		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>	<b>Kec Ngebel</b>		<b>7.500.000</b>			<b>75%</b>	<b>7.500.000</b>
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya</b>		<b>75%</b>	<b>3.500.000</b>			<b>75%</b>	<b>3.500.000</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM		8 desa	3.500.000			8 desa	3.500.000
		Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan/lingkungan hidup		8 desa			8 desa		
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa		8 desa			8 desa		
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya</b>		<b>75%</b>	<b>4.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>4.000.000</b>

7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatan ekonominya		8 kel	2.000.000			10 kel	2.000.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang dibina produksi/ distribusi hasil produksinya		8 desa	2.000.000			8 desa	2.000.000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana</b>		<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi trantibum dengan instansi vertikal/lintas sektor yang dilaksanakan		3 Fasilitasi	2.000.000			3 Fasilitasi	2.000.000
		Jumlah fasilitasi pembinaan anggota FKPSB		3 fasilitasi				3 fasilitasi	
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemilu		-				-	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>44.200.000</b>			<b>75%</b>	<b>44.200.000</b>
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>44.200.000</b>			<b>100%</b>	<b>44.200.000</b>
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi		2 event	15.000.000			2 event	15.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan ke Pemerintah Desa bersama Forpimka		8 fasilitasi	29.200.000			8 fasilitasi	29.200.000
		Jumlah fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum		3 Fasilitasi				3 Fasilitasi	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>		<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk hukum desa yang disusun		40 Dok	2.000.000			40 Dok	2.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan		12 laporan	2.000.000			12 laporan	2.000.000
		Jumlah fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan dan pertanahan yang dilaksanakan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya		8 Desa	2.000.000			8 Desa	2.000.000
		Jumlah desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD/DD		8 Desa				8 Desa	
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu		18,153				18,153	

		Prosentase pembayaran PBB tepat waktu		100%				100%	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum		12 Laporan	12.000.000			12 Laporan	12.000.000
		Jumlah penyuluhan peraturan perundangan		2 rapat				2 rapat	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.		1 Desa	2.000.000			0	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya		1 Desa	2.000.000			1 Desa	2.000.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan sospol /ideologi negara/kesbang/perlindungan dan ketertiban masyarakat		4 rapat	3.000.000			4 rapat	3.000.000
		Jumlah patroli/monitoring pencegahan gangguan trantibum/ penanggulangan bencana yang dilaksanakan		12 laporan				12 laporan	
		Jumlah laporan kejadian/pelaksanaan tugas trantibum		12 laporan				12 laporan	
		Jumlah fasilitasi pengamanan kantor dan rumah dinas Camat		12 fasilitasi				12 fasilitasi	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang		8 desa	5.000.000			8 desa	5.000.000
		Jumlah desa yang menyusun profil desa		8 desa				8 desa	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah PKK Desa yang dibina		8 Desa	9.000.000			8 Desa	11.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>2.178.639.530,94</b>				<b>2.234.652.841</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, maka disusunlah rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir :

Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi	Kec Ngebel	100%	1.953.601.650,94	
		Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kec Ngebel	100%		
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Kec Ngebel	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		100%	4.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang disusun		8 Dok	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		6 Dok	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		100%	1.547.788.096	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN		17 Orang	1.510.788.095,94	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan Teknis Kegiatan		5 Orang	36.000.000	
		Jumlah surat permintaan pembayaran langsung SPP yang tersusun		100 Dok		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu		5 Dok	1.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase keakuratan data kepegawaian		100%	13.500.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas		19 orang	7.000.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan/pembinaan administrasi kepegawaian		12 Laporan	1.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		1 Orang	5.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	187.313.555	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		4 Paket	2.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		3 item	40.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli		2 item	38.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penerimaan makanan dan minuman harian		12 Laporan	80.313.555	
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		20 rapat		
		Jumlah ATK yang tersedia		6 paket		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		4 paket	4.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu		5 fasilitasi	5.000.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		3 rapat	15.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen fasilitasi Inovasi berbasis elektronik		1 Dokumen	3.000.000	
7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli		2 item	25.000.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>		<b>100%</b>	<b>17.500.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		1200 dok	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan		12 Laporan	12.500.000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>158.500.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		2 Unit	57.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diperbaiki		3 Unit	1.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara		1 Unit	100.000.000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>22.000.000</b>	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan/pelaksanaan pelayanan yang disusun</b>		<b>75%</b>	<b>7.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang diterbitkan		38 Dok	2.000.000	
		Jumlah SPP yang diterbitkan		1 Dok		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah berkas kependudukan, surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan/didokumentasikan		750 Dok	3.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi/koordinasi peningkatan pelayanan umum		4 rapat	2.000.000	
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Prosentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara</b>		<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah penerima jasa kebersihan		12 Laporan	15.000.000	
		Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia		4 paket		
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tercapai</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti</b>		<b>75%</b>	<b>110.337.880</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti		4 Event	110.337.880	
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI		4 Event		
		Jumlah fasilitasi pembinaan bidang pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak		4 fasilitasi		

		Jumlah difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.		12 fasilitasi		
		Jumlah pembinaan kesehatan/ gizi/pemberantasan penyakit menular		8 Pokja		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) nya</b>	<b>Kec Ngebel</b>		<b>7.500.000</b>	
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya</b>		<b>75%</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM		8 desa	3.500.000	
		Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan/lingkungan hidup		8 desa		
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa		8 desa		
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatannya</b>		<b>75%</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatan ekonominya		8 kel	2.000.000	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang dibina produksi/ distribusi hasil produksinya		8 desa	2.000.000	
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat ketentraman dan ketertiban wilayahnya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana</b>		<b>75%</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi trantibum dengan instansi vertikal/lintas sektor yang dilaksanakan		3 Fasilitasi	2.000.000	
		Jumlah fasilitasi pembinaan anggota FKPSB		3 fasilitasi		
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemilu		-		
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Prosentase desa yang meningkat Indeks Ketahanan Sosial (IKS) nya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>44.200.000</b>	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>44.200.000</b>	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi		2 event	15.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan ke Pemerintah Desa bersama Forpimka		8 fasilitasi	29.200.000	
		Jumlah fasilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum		3 Fasilitasi		
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desanya</b>	<b>Kec Ngebel</b>	<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti</b>		<b>75%</b>	<b>39.000.000</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk hukum desa yang disusun		40 Dok	2.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan		12 laporan	2.000.000	
		Jumlah fasilitasi dan pembinaan bidang kependudukan dan pertanahan yang dilaksanakan		12 Laporan		

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya	8 Desa	2.000.000	
		Jumlah desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD/DD	8 Desa		
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu	18,153		
		Prosentase pembayaran PBB tepat waktu	100%		
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum	12 Laporan	12.000.000	
		Jumlah penyuluhan peraturan perundangan	2 rapat		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya.	1 Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desanya	1 Desa	2.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan sospol /ideologi negara/kesbang/perlindungan dan ketertiban masyarakat	4 rapat	3.000.000	
		Jumlah patroli/monitoring pencegahan gangguan trantibum/ penanggulangan bencana yang dilaksanakan	12 laporan		
		Jumlah laporan kejadian/pelaksanaan tugas trantibum	12 laporan		
		Jumlah fasilitasi pengamanan kantor dan rumah dinas Camat	12 fasilitasi		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang	8 desa	5.000.000	
		Jumlah desa yang menyusun profil desa	8 desa		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah PKK Desa yang dibina	8 Desa	9.000.000	

## BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngebhel Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngebhel Tahun 2022, Camat Ngebhel melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Ngebhel tahun 2022 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ngebhel setiap kegiatan. Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Ngebhel Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa) “**.

Amien.

Ponorogo, 25 September 2021

